

YouTube BNPB Indonesia Diretas, Siarkan Aset Kripto Ethereum

JAKARTA (IM) - Akun resmi YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diretas, hingga acaranya pun berbeda yang menyiarkan siaran langsung Ethereum 2.0, Kamis (9/12).

Pada pukul 12.55 WIB, akun YouTube BNPB terputus masih belum pulih, dan masih menyiarkan siaran langsung aset kripto Ethereum. Akun pun berubah nama menjadi Ethereum 2.0.

Kepala Bidang Humas BNPB, Rita Rosita, membenarkan kejadian tersebut. Rita

menyampaikan pihaknya tengah berupaya mengembalikan akun tersebut saat ini.

"Iya, ada sedikit kendala. Saat ini staf kami sedang mencoba memperbaikinya," kata Rita kepada wartawan, Kamis (9/12).

Bahkan, akun tersebut sedang menayangkan siaran langsung perbincangan aset kripto oleh pendiri Ethereum, Vitalic Buterin. Siaran langsung berjudul Ethereum CEO: Ethereum Breakout! Ethereum News, ETH 2.0 RELEASE Date. ● **mei**

Ketua MPR Targetkan Kajian Amandemen UUD 1945 Kelar April 2022

JAKARTA (IM) - Ketua MPR Bambang Soesatyo menargetkan kajian amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 kelar sekitar April 2022. Hal itu disampaikan Bambang ketika ditanya mengenai perkembangan wacana amandemen UUD 1945 terkait Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

"Kami berharap Badan Kajian MPR dan K3, Komisi Kajian Konstitusi bisa menyelesaikannya pada April mendatang," kata Bambang ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/12).

Bamsot - panggilan untuk Bambang Soesatyo - menegaskan, pengkajian amandemen terbatas UUD 1945 terus berlangsung. Setelah pengkajian selesai, hasilnya akan disampaikan ke seluruh pimpinan MPR. Selanjutnya, MPR akan menentukan apakah lahirnya PPHN harus melalui amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR (TAP MPR), atau Undang-

Undang (UU).

"Kita berkumpul kembali untuk brainstorming apakah nanti bentuknya UU, kalau UU nanti diserahkan kepada DPR," ujarnya.

Sementara itu, apabila diputuskan melalui TAP MPR, maka harus amandemen. Jika amandemen yang akan diputuskan, lanjut Bamsot, harus diingatkan bahwa PPHN hanya akan mengubah atau menambah dua ayat yaitu satu ayat di Pasal 3 dan Pasal 23.

Selain itu, juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan lain dalam rencana melakukan amandemen UUD 1945, selain melahirkan PPHN.

"Jadi tidak ada pembahasan lain terkait dengan penambahan periode-sasi, penambahan kekuasaan MPR, dan lain-lain. Hanya menambah dua ayat di Pasal 3 dan Pasal 23," ujar politikus Partai Golkar itu. ● **mei**

Mayjen Teguh Muji Angkasa Kini Menjadi Komandan Kopassus

JAKARTA (IM) - Mayor Jenderal Teguh Muji Angkasa kini menjabat Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menggantikan Mayor Jenderal Muhammad Hasan. Acara serah terima jabatan (sertijab) dilakukan di Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (9/12) pagi.

Setelah prosesi sertijab, Teguh dan Hasan memimpin rangkaian tradisi penyerahan satuan Kopassus yang berlangsung di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta, Kamis siang.

"Pada hari ini saya perlu menyerahkan satuan Kopassus secara resmi kepada pengganti saya yang disaksikan bersama seluruh anggota Kopassus yang hadir di tempat ini," ujar Hasan dalam sambutannya, Kamis (9/12).

Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga menyampaikan terima kasih kepada segenap keluarga Kopassus. Terima kasih disampaikan mulai dari prajurit hingga PNS Kopassus

yang telah memberikan loyalitas dan kesetiannya selama dirinya memimpin Kopassus kurang lebih sekitar 1 tahun.

"Sehingga selama 1 tahun 3 bulan saya menjabat sebagai Danjen kopassus tugas satuan dapat terlaksana dengan baik dan lancar," kata Hasan.

Sementara itu, Teguh mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan TNI AD yg telah memberikan amanah dan kepercayaan kepadanya untuk memimpin satuan terbaik di negeri ini.

"Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga dan kedua orangtua yang selalu mendoakan, mendampingi, dan mendukung sehingga saya bisa dapat dipercaya menjadi Komandan Jenderal Kopassus," kata Teguh.

Teguh sebelumnya menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan (Unhan). Sementara, Hasan kini menjabat sebagai Pangdam Iskandar Muda. ● **han**

Tes Daya Tahan, Ranpur Anoa-2 6x6 Jalani Uji Ledakan Ranjau 8 Kilogram

JAKARTA (IM) - PT Pindad (Persero) melakukan uji ledakan ranjau (INT) terhadap kendaraan tempur (ranpur) Anoa-2 6x6 di Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed), Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/12). "Kegiatan uji di sini konsepnya adalah bagaimana kita meningkatkan ballistic protection dari ranpur Anoa-2 dengan menambahkan V-shape untuk struktur tahan ledaknya," ujar Vice Presiden PM & K3LH PT Pindad Prima Kharisma, dikutip dari laman PT Pindad, Kamis (9/12).

Pengujian dilakukan dengan menempatkan TNT yang mengacu pada standar STANAG 4569-AEP-55 bervolume 2 Level 3B (INT 8 kilogram). Untuk mensimulasikan awak kendaraan, dipasang sebuah manekin khusus anthropomorphic test device (ATD) crash test dummy bekerja sama dengan FNSS yang dilengkapi sensor untuk mengukur risiko cedera pada awak kendaraan.

Sehingga dapat dievaluasi kelayakan ballistic protection dari Ranpur 6x6 Anoa-2. Adapun struktur tahan ledak ranpur Anoa-2 6x6 disiapkan secara khusus untuk mengaplikasikan tingkat perlindungan ranpur di medan darat.

Mock up juga dilengkapi V-shape baja pelindung tambahan ranpur Anoa-2 6x6 memiliki berat sekitar 160 kg. Pindad sendiri sebelumnya telah sukses melakukan uji ledak ranjau terhadap kendaraan medium tank Harimau pada Juli 2018. ● **Ius**

dijadikan sebagai bahan peningkatan kemampuan ranpur tahan ranjau di medan darat ke depannya.

Direktur Teknologi & Pengembangan PT Pindad Sigit P Santosa menyampaikan, Pindad berkolaborasi dengan ITB telah mampu menguasai teknologi terbaru dan sudah menghasilkan paten serta publikasi ilmiah.

Setidaknya ada tiga paten yang sudah dihasilkan beserta publikasi ilmiah yang telah diterbitkan.

"Alhamdulillah kita selesaikan semuanya dan ini tentunya menjadi bagian yang bisa kita jadikan sebuah model dan riset di perguruan tinggi yang bisa langsung kita implementasikan dan secara komersial diproduksi oleh industri dan digunakan oleh user," kata Sigit.

Spesifikasi mock-up ranpur Anoa-2 6x6 yang digunakan pada uji ledak mengacu pada spesifikasi teknik produk eksisting Anoa-2 saat ini, yakni memiliki berat 14,5 ton. Sementara dimensi panjang 6 meter, lebar 2,5 meter, tinggi 2,150 meter serta terpasang ban runflat (tipe donat).

Mock up juga dilengkapi V-shape baja pelindung tambahan ranpur Anoa-2 6x6 memiliki berat sekitar 160 kg. Pindad sendiri sebelumnya telah sukses melakukan uji ledak ranjau terhadap kendaraan medium tank Harimau pada Juli 2018. ● **Ius**

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

PENCARIAN KORBAN LETUSAN GUNUNG SEMERU

Tim SAR gabungan bersama Marinir mencari korban yang tertimbun di jalur material guguran awan panas Gunung Semeru di Curah Koboan, Pronojiwo, Jawa Timur, Kamis (9/12). Pencarian korban guguran awan panas Gunung Semeru difokuskan di sejumlah titik di antaranya Kajar Kuning, Sumber Wuluh, Curah Koboan dan Pronojiwo.

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Berada di Rangka 102, Perlu Diperbaiki

Presiden Jokowi dorong KPK dan Kejagung memberikan dakwaan maksimal untuk kasus TPPU. Hal ini untuk memastikan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku TPPU.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. Sebab berdasarkan data pada 2020, Indonesia masih menduduki ranking 102 dalam indeks persepsi korupsi.

Menurut Presiden Jokowi, capaian tersebut masih kalah dari negara-negara lain di Asia. "Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/12).

"Simpapura sekali lagi ranking ketiga, Brunci Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita," kata Jokowi.

Dia menekankan, perbaikan indeks persepsi korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Namun, di sisi lain ada perkembangan yang menggembirakan dari sisi perilaku antikorupsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik.

"Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88, artinya semakin tahun semakin membaik," ungkap Jokowi.

Mihat fakta-fakta itu, kepala negara meminta agar ada cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Metode pem-

berantasan korupsi harus terus diperbaiki dan disempurnakan. Ia menekankan, penindakan atas korupsi jangan hanya menyoar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan.

"Namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," tegas Jokowi.

"Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelak tetapi juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara," katanya menambahkan.

Beri Dakwaan Maksimal

Dalam kesempatan itu, Jokowi mendorong KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan dakwaan maksimal untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini untuk memastikan sanksi pidana yang

tegas bagi para pelaku TPPU.

"Saya mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas. Dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara," katanya.

Jokowi pun mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki kerjasama internasional terkait dengan pengembalian aset pidana dengan beberapa negara.

Di antaranya dengan Swiss dan Rusia.

"Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri," tuturnya.

Dengan perjanjian ini, Jokowi mengatakan bahwa buron-buron koruptor yang di luar negeri pun bisa dikejar.

"Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa saat masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Hal ini tentunya melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau.

"(Lalu) pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah. Serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah," tandasnya. ● **mar**

Jasa Raharja Dukung Digitalisasi Samsat

JAKARTA (IM) - Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwanto menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Rakornas tersebut membahas bagaimana langkah-langkah terobosan dan inovasi di era digital guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor.

Rapat Koordinasi Tim Pembina SAMSAT tingkat nasional, yang berlangsung di Batam, Rabu (8/12), dengan tema Kolaborasi Pelayanan Samsat di Era Digital dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima, dihadiri oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Drs Agung Budi Maryoto MSI mewakili Kapolri, Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Agus Fatoni, MSI, mewakili Menteri Dalam Negeri, Kakorlantas Jend Pol Jend Pol Drs. Firman Shantyabudi, MSI, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kapolda Kepri Irjen Pol DR Aris Budiman Bulu, MSI, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Drs Yusri Yunus, Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana dan pejabat lainnya.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwanto mengatakan, saat ini diperlukan langkah-langkah digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor, BBNKB, SWDKLJ, dan pendapatan negara bukan pajak lainnya. Hal ini mutlak diperlukan seiring dengan tren digital di setiap lini kehidupan saat ini.

"Dalam melaksanakan kegiatan di Samsat diperlukan langkah-langkah digitalisasi yang tepat baik yang dilakukan Polri, Bapenda Provinsi maupun Jasa Raharja, agar dapat memberikan layanan terintegrasi yang kian mendukung dan memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya,"

jelas Rivan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (8/12).

Samsat merupakan pelayanan satu atap yang dilakukan oleh Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja terkait registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lebih lanjut Rivan memaparkan, Jasa Raharja turut melaksanakan inisiatif untuk mendukung pelayanan masyarakat yang terintegrasi melalui pemanfaatan big data dan sinergi antar instansi untuk menuju pengelolaan data Samsat yang terpusat dan terintegrasi serta memiliki kualitas data sesuai standar.

Saat ini, berdasarkan database Jasa Raharja, terdapat 1.674 Samsat, baik Samsat Induk, Pembantu, Unggan (Drive Thru, Online, Keliling dan Gerai), dengan transaksi hingga dengan November 2021 mencapai 66.449.163.

Menurut Rivan, Tim Pembina Samsat telah membentuk Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) dan Digitalisasi Road Tax, yang diharapkan dapat terus berkembang ke depannya tidak hanya sebagai alat saluran pembayaran tapi juga dapat menjadi bank data. Hal ini diperlukan sebagai alat analisis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor otomotif dan meningkatkan fungsi verifikasi kendaraan bermotor. ● **mei**

PENGUMUMAN PEMBUBARAN

Berdasarkan Akta No.05 tanggal 07 Desember 2021 dibuat dihadapan Heri Martono, SH., Notaris di Bekasi, PT. MEYZ LEGAL INDONESIA dibubarkan sejak tanggal 06 Desember 2021. Para kreditur Perseroan yang memiliki tagihan terhadap Perseroan dapat mengajukan tagihannya (didukung dengan bukti dan dokumen yang relevan) kepada Likuidator pada alamat : Gandaria 8 Office Tower Lt.6 Unit 1, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 10 Desember 2021
LIKUIDATOR PT MEYZ LEGAL INDONESIA
(DALAM LIKUIDASI)

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. INOCARE MEDIKA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan"), memberitahukan bahwa para pemegang saham dalam Perseroan akan mengalihkan sebagian besar saham dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan saham pengendali saham Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.

Jakarta, 10 Desember 2021
PT. INOCARE MEDIKA INDONESIA
Direksi

9 Bayi Lahir Akibat Ulah Guru Pesantren Cabul, Keluarga Korban Minta Pelaku Dihukum Dikebiri

BANDUNG (IM) - Oknum guru pesantren, Herry Wirawan alias Heri mencabuli belasan santrinya, hingga menyebabkan korban-korbannya hamil hingga melahirkan. Berdasarkan informasi terbaru yang didapat dari berbagai sumber, setidaknya 9 bayi lahir akibat perbuatan pelaku.

Bahkan dilaporkan masih ada dua lagi korban yang kini tengah mengandung bayi akibat ulah becak pelaku.

"Waktu prapenuntutan itu masih delapan, ketika persidangan ini digelar akan sembilan," ungkap Plt Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Riyono kepada wartawan, Kamis (9/12).

Selain sembilan anak yang telah lahir dari santri-santri yang dicabulinya, masih ada dua anak korban kebajatan pelaku yang masih mengandung anak. Hingga saat persidangan digelar, kata Riyono, anak tersebut belum lahir.

"Kemudian ada juga yang masih hamil," katanya.

Lebih lanjut, Riyono mengatakan, pihaknya juga kini telah mengkaji tuntutan hukuman kebiri bagi pelaku menyusul kabarnya permintaan hukuman kebiri dari keluarga korban.

"Kita kaji dari hasil persidangan dan sebagainya. Karena hukuman ini pemberatan, sehingga kami kaji lebih lanjut," kata Riyono.

Riyono menjelaskan, sejauh ini, pelaku didakwa dakwaan pri-

mair Pasal 81 ayat (1) ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan dakwaan subsidiar Pasal 81 ayat (2), ayat (3) jo Pasal 76.D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. "Ancaman pidananya 15 tahun, tapi di sini ada pemberatan. Di sini dia sebagai guru sehingga hukuman ancamannya jadi 20 tahun," kata Riyono.

Menurut beberapa keluarga korban, hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku. Palsanya, pelaku telah mengakibatkan para korban kehilangan harga diri sekaligus masa depannya.

"Ini seharusnya hukuman paling ringan itu hukuman kebiri atau seumur hidup, maunya keluarga seperti itu," ujar salah seorang perwakilan keluarga korban bernama Hikmat Dijaya.

Menurutnya, tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Palsanya, para korban, termasuk keponakannya sendiri kini telah kehilangan harga diri dan masa depannya.

"Kita sudah kehilangan harga diri dan masa depan anak dan mental anak yang ada di sini, harapan kita itu sudah mati suri lah," ujarnya.

Hikmat Dijaya pun berharap, semua pihak mengawal perkara ini. Dia khawatir, tanpa dikawal, pelaku malah dibenarkan hukuman ringan.

"Taktunya ada hukuman yang bisa meringankan karena ini jelas pelanggaran yang mutlak untuk anak," kata Hikmat.

Sebelumnya, masyarakat digegerkan kabar aksi cabul seorang guru pesantren di Kota Bandung bernisial HW yang memperkosakan belasan santrinya, bahkan empat santri di antaranya hamil hingga melahirkan.

HW atau Herry Wirawan alias Heri bin Dede diketahui mencabuli belasan santrinya di berbagai tempat di Kota Bandung. Tidak hanya di pesantren TM tempatnya mengajar di kawasan Ciburu Kota Bandung, Herry juga mencabuli santri-santrinya di apartemen hingga hotel.

Kasipenkom Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Dodi Gazali Emil mengungkapkan, perbuatan cabul dilakukan Herry yang kini sudah berstatus terdakwa di berbagai tempat, di antaranya di Yayasan Pesantren TM, Yayasan Komplek Sinergi, Pesantren MH, Basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R.

"Perbuatan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dilakukan sekitar tahun 2016 sampai dengan 2021," ungkap Dodi, Rabu (8/12) kemarin. ● **han**

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jalan Kembangan Utara, Komplek Perumahan Perumahan Perumahan Jakarta Barat, Telp. 021-582588-69							
PENGUMUMAN No.265/Peng-31.7.HGB.02.03.300XII/2021							
Berpedoman pada Penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 52 ayat (2), dalam rangka pemohonan hak atas Tanah Negara Bebas Hak Pakai Nomor 34/Angke Seperti tersebut dibawah ini, Pemohon tidak dapat menyerahkan asli sertifikat hak atas tanahnya karena hilang, dengan ini diumumkan:							
NO	NAMA / ALAMAT PEMOHON	STATUS HAK ATAS TANAH	TERDAFTAR ATAS NAMA	a. TGL. PENDAFTARAN HAKNYA b. TGL. BERAKHIR c. Gambar Situasi	LETAH TANAH	RU/PETA BAWAH TANAH YG DIMOHON a. NIB b. TGL c. NO d. LUSAS	SURAT PEROLEHAN TANAH DARI PEMOHON
1.	CHRISTOPHER SUMASTO TEJA Gresia Gunan Blak 02-21 RT 009 RW 010 Kebonjaya Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta Jakarta	Emas bebas Hak Pakai Nomor 34/Angke	WILLIAM HERMAN	a. 02-05-1973 b. tanpa-waktu yang tidak ditentukan c. No.49/191/1973 Tgl. 10-05-1973	Jalan Angke Jaya VII Gang Mawar No.3 RT.002 RW.07, Kelurahan Angke, Kecamatan Timbora, Kota Administrasi Jakarta Barat.	a. 09.03.04.05.072 b. 14-07-2020 c. 111/7021 d. 441 M ²	Bahan pemohon merupakan hak-hak milik sendiri tanah sebagai berikut: 1. Berdasarkan Surat Keterangan Tanah Laporan Kelangkaan dari kasi I K3I SPK berdasar atas nama Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta tanggal 23 November 2021 Nomor : 3482/KEJ.021 2. Re-Ja-San-SPK, ditandatangani : All sertifikat Hak Pakai Nomor 34/Angke atas nama WILLIAM HERMAN DIA situs 4E, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 02-05-1973 No.49/191/1973, DIPAPORKAN OLAK EDI WIDAWA, TEL.AB.HILANG. 3. Berdasarkan hasil penelitian pada Blok Tanah Hak Pakai Nomor 34/Angke oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat tgl 15-10-2021 ditandatangani bahwa terdapat objek Hak atas Tanah tersebut adalah tanah tidak ada catatan hak-hak.

Kepada siapa yang berkeberatan atas pemohonan hak atas tanah tersebut di atas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Komplek Perumahan Taman Perumahan Binau Jakarta, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diumumkan dalam surat kabar dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikannya. Keberatan-keberatan yang diajukan setelah lewat waktu tersebut, tidak dapat dipertimbangkan dan pemohonan hak atas tanahnya akan dilanjutkan prosesnya sesuai dengan peraturan dan perundang yang berlaku.

Jakarta, 06 Desember 2021
A.n Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Pendaftaran

titd
Nono Sukirno, A.Plnh., M.M
NIP. 196610031986031001